



LUMAJANG
EKSOTIK

tribulan III

LKJ

LAPORAN KINERJA

Kepala Bagian
Tata Pemerintahan

2
0
2
3



BAB I PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja tribulan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode tribulan. Dan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tribulan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tribulan III Tahun Anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 6 ayat (1) telah diamanatkan bahwa Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, pembinaan administrasi dan pembinaan sumber daya serta aparatur dan manajemen pelaporan pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah serta kerjasama dan administrasi kewilayahan. Adapun fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi Kewilayahan;



2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program/kegiatan serta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan di bidang administrasi pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kerjasama dan administrasi kewilayahan;
3. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, supervisi, bimbingan dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan;
5. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil di bidang administrasi pemerintahan dan otonomi daerah, kerjasama dan administrasi kewilayahan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan fungsinya.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepala Bagian Tata Pemerintahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %
		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100 %
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	100 %
		Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %
		Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %



2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu 1 Juli s.d 30 September 2023, capaian kinerjanya adalah :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tribulan III Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75 %	75%	100%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	25 %	25%	100%
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	25 %	25%	100%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	25 %	25%	100%
		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	22 %	22%	100%
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	21 %	64%	300%
		Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	0%	0%	0%
		Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	0%	0%	0%



Dari tabel 2.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tribulan III yaitu 100% telah memenuhi target sebesar 75% dengan realisasi 75%. Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
2. Capaian kegiatan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor Tribulan III yaitu 100% telah memenuhi target sebesar 25% dengan realisasi 25%. Terdapat beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
3. Capaian kegiatan fasilitasi Administrasi Umum PD Tribulan III yaitu 100% telah memenuhi target sebesar 25% dengan realisasi 25%. Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyediaan bahan logistik kantor dan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Capaian kegiatan fasilitasi pemeliharaan BMD Tribulan III yaitu 100% telah memenuhi target sebesar 25% dengan realisasi 25%. Sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyediaan BBM kendaraan dinas jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. Capaian kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Tribulan III yaitu 100% telah memenuhi target sebesar 22% dengan realisasi 22%. Kinerja pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang sudah dilaksanakan pada Tribulan III meliputi kegiatan Sosialisasi Sinergisitas Kinerja Kecamatan dan Pelaporan PATEN Semester I.
6. Capaian kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan pada Tribulan III yaitu 300% melebihi target sebesar 21% dengan realisasi 64% dikarenakan banyaknya permohonan fasilitasi dan koordinasi kerjasama yang diajukan kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang. Diantaranya terdapat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Stikes Hafshawati Banyuwangi, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan



Kejaksaan Negeri Lumajang, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Lumajang, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Rumah Sakit Wijaya Kusuma, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Permata Nahdlatul Ulama, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Rumah Sakit Islam, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Rumah Sakit Bahayangkara, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang, Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang (Dinsos P3A) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Lumajang.

7. Capaian kegiatan Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah Tribulan III yaitu 0% dan belum mencapai 100% dikarenakan kegiatan juga dilaksanakan pada Semester II. Namun telah dilaksanakan pada Tribulan II yaitu mencapai 50%.
8. Capaian kegiatan Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pada Tribulan III yaitu 0% dikarenakan target telah dilaksanakan pada Tribulan I dan akan dilaksanakan pada Tribulan IV.



Berikut capaian kinerja terhadap target satu tahun di Tahun 2023, yaitu :

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	75%	75%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	75%	75%
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	75%	75%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	75%	75%
		Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	78%	78%
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	100%	157%	157%
		Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	50%	50%
		Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	50%	50%

Dari tabel 2.3 terlihat bahwa untuk kegiatan fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar 75% terhadap target 100%, kegiatan fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor terealisasi sebesar 75% dari target



100%, kegiatan fasilitasi Administrasi Umum PD terealisasi sebesar 75% dari target 100%, kegiatan fasilitasi pemeliharaan BMD PD terealisasi sebesar 75% dari target 100%, kegiatan Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan terealisasi sebesar 78% dari target 100%, kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan terealisasi sebesar 157% dari target 100%, kegiatan Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah dilaksanakan terealisasi sebesar 50% dari target 100% dan kegiatan Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja terealisasi sebesar 50% dari target 100%. Tabel 2.3 diatas merupakan Target kinerja selama 1 tahun terhadap realisasi kinerja selama Tribulan I sampai Tribulan IV. Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.4 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.



Tabel 2.4
Cost per outcome Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023 - Tribulan III

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 14.870.000	Rp 14.695.000	98,82%	75 %	75%	100%	0,18%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Rp 19.025.000	Rp 19.006.760	99,90%	25 %	25%	100%	0,10%
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Rp 19.490.500	Rp 19.276.107	98,90%	25 %	25%	100%	1,1%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Rp 4.700.000	Rp 4.646.375	98,86%	25 %	25%	100%	1,14%



	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 43.178.200	Rp 42.727.000	98,96%	22 %	22%	100%	1,04%
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	Rp 16.500.000	Rp 16.450.000	99,70%	21 %	71%	>100%	0,3%
	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Rp 0	Rp 0	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Rp 0	Rp 0	0%	0%	0%	0%	0%



Dari tabel 2.4 terlihat bahwa :

1. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tribulan III yaitu 75% dengan capaian kinerja dan anggaran sebesar 75%.
2. Efisiensi Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor yaitu 0,10% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%, capaian anggaran 99,90% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp 19.006.760 dari Anggaran Tribulan III sebesar Rp 19.025.000.
3. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD yaitu 1,1% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%.
Capaian anggaran sebesar 98,90% dengan realisasi anggaran sesuai LRA Rp 19.276.107 dari Anggaran Tribulan III sebesar Rp 19.490.500.
4. Efisiensi Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD yaitu 1,14% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 25%.
Capaian anggaran 98,86% dengan realisasi anggaran sesuai LRA sebesar Rp 4.646.375 dari Anggaran Tribulan III sebesar Rp 4.700.000.
5. Efisiensi Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yaitu 1,04% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja telah memenuhi target sebesar 22%.
Capaian anggaran 98,96% dengan realisasi anggaran sesuai LRA sebesar Rp 42.727.000 dari Anggaran Tribulan III sebesar Rp 43.178.200.
6. Efisiensi Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan yaitu 0,3% dengan capaian kinerja lebih dari 100% dengan realisasi kinerja telah melebihi target sebesar 21%.
Capaian anggaran 99,70% dengan realisasi anggaran sesuai LRA sebesar Rp 16.450.000 dari anggaran Tribulan II sebesar Rp 16.500.000.
7. Efisiensi Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah sebesar 0% pada pada Tribulan III, namun telah dilaksanakan pada Tribulan II mencapai 50% dan akan dilaksanakan lagi pada pada Tribulan IV.



8. Efisiensi Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dengan capaian kinerja sebesar 0% pada Tribulan III, namun telah dilaksanakan pada Tribulan I mencapai 50% dan akan dilaksanakan lagi pada Tribulan IV.

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.4 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di tribulan III Tahun Anggaran 2023, bukan merupakan capaian realisasi keseluruhan. Adapun realisasi capaian keseluruhan sebagai berikut :



Tabel 2.5
Cost per outcome Kepala Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 25.150.000	Rp14.695.000	58,43%	100%	75%	75%	16,57%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Rp 80.764.000	Rp59.518.562	73,69%	100%	75%	75%	1,31%
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Rp122.049.664	Rp50.797.773	41,62%	100%	75%	75%	33,38%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Rp 43.350.000	Rp24.974.201	57,61%	100%	75%	75%	17,39%



	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	Rp1.295.130.150	Rp147.982.500	11,43%	100%	78%	78%	66,57%
	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	Rp 183.032.550	Rp29.890.200	16,33%	100%	>100%	100%	83,67%
	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Rp 0	Rp 0	0%	100%	50%	50%	50%
	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Rp 0	Rp 0	0%	100%	50%	50%	50%



Dari tabel 2.5 terlihat bahwa :

1. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu 16,57% dengan capaian kinerja sebesar 75% terhadap target 100% dan capaian anggaran 58,43% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.695.000 terhadap Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 25.150.000.
2. Efisiensi Persentase fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor yaitu 1,31% dengan capaian kinerja sebesar 75% terhadap target Tahun 2023 sebesar 100%, dan capaian anggaran 73,69% dengan realisasi anggaran Rp 59.518.562 terhadap Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 80.764.000.
3. Efisiensi Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu sebesar 33,38% dengan capaian kinerja sebesar 75% terhadap target Tahun 2023 sebesar 100%, dan capaian anggaran 41,62% dengan realisasi anggaran sesuai LRA sebesar Rp. Rp50.797.773 dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 122.049.664.
4. Efisiensi Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD yaitu 17,39% dengan capaian kinerja sebesar 75% terhadap target Tahun 2023 sebesar 100%, sedangkan capaian anggaran 57,61% dengan realisasi sesuai LRA sebesar Rp 24.974.201 dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 43.350.000.
5. Efisiensi Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yaitu 66,57% dengan capaian kinerja sebesar 78% dengan target Tahun 2023 sebesar 100%, serta capaian anggaran 8,13% dengan realisasi anggaran sesuai LRA sebesar Rp 147.982.500 dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 1.295.130.150.
6. Efisiensi Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan yaitu 83,67% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan target Tahun 2023 sebesar 100%, sedangkan capaian anggaran 16,33% dengan realisasi anggaran sesuai LRA sebesar Rp 29.890.200 dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 183.032.550.
7. Efisiensi Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yaitu 50% pada semester II sedangkan capaian anggaran 0% dikarenakan tidak ada anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah.
8. Efisiensi Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yaitu 50% dengan capaian kinerja 50% terhadap target sebesar



100%, sedangkan capaian anggaran 0% dikarenakan tidak ada anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sampai akhir Tahun Anggaran 2023, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah mereviu kembali *schedule* program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada dokumen perencanaan. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam mencapai target kinerja yang belum tercapai di sisa tahun anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Belum Tercapai Di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN setiap bulan	Dilakukan pada Tribulan IV Tahun 2023
2.	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor setiap bulan	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2023
3.	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD setiap bulan	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2023
4.	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan mobil dinas dan pemeliharaan komputer dan printer secara berkala	Dilakukan setiap bulan di Tahun 2023
5.	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	- Melaksanakan Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan - Melaksanakan kegiatan PATEN II	Dilaksanakan pada Tribulan IV



6.	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan	Meningkatkan target kinerja kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama, dimana pada Tahun 2023 terdapat banyak pengajuan fasilitasi kerjasama.	Dilakukan setiap bulan
7.	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Melakukan pelaporan penatausahaan barang secara tepat waktu	Dilakukan pada Semester II
8.	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Melaksanakan perencanaan anggaran secara tepat waktu	Dilakukan pada Tribulan IV

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta penyelenggaraan Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan.
3. Menyusun kegiatan sesuai dan *Time Schedule* lebih baik lagi.
4. Melaksanakan semua kegiatan sesuai *Time Schedule* yang sudah ada.
5. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait draft Kerjasama.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki



Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain *Laporan sudah baik, pertahankan dan
tingkatkan !! for the vision of Lumajang*



BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Pemerintahan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Realisasi anggaran yang sudah terlaksana belum terinput pada Laporan Realisasi Anggaran sehingga capaian anggaran belum maksimal.
3. Adapun strategi yang dilakukan dengan mencermati kembali *time schedule* kegiatan dan anggaran serta melaksanakannya sesuai *time schedule* yang ditetapkan

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat

Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 5 Oktober 2023

Kepala Bagian Tata Pemerintahan

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN LUMAJANG



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. PAIMAN
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, April 2023

Pihak Kedua,

Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Pihak Pertama,

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN LUMAJANG

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor Perangkat Daerah Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Fasilitas dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan Persentase Fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 25.150.000
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 60.944.757
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 110.533.664
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 36.157.353
5.	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 1.269.060.150
6.	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Rp 176.432.550
7.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp -
8.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp -
JUMLAH		Rp 1.678.278.474

Lumajang, April 2023

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

KEPALA BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001



1. Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

REKENING INTERNET KANTOR
BAG. TATA PEMERINTAHAN
BULAN JULI 2023

REKENING TELEPON KANTOR
BAG. TATA PEMERINTAHAN
BULAN JULI 2023





REKENING INTERNET KANTOR
BAG. TATA PEMERINTAHAN
BULAN AGUSTUS 2023



REKENING TELEPON KANTOR
BAG. TATA PEMERINTAHAN
BULAN AGUSTUS 2023





REKENING INTERNET KANTOR
BAG. TATA PEMERINTAHAN
BULAN SEPTEMBER 2023

16.18

Transaksi Berhasil

Tanggal 20 Sep 2023 | 16:18:42
WIB

Nomor Referensi 586206197413

Sumber Dana VENY DIA KENCANA
0044 **** * 538

Jenis Transaksi TV Kabel dan Internet

Nama ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

Nomor Pelanggan 152504302196

[Lihat Detail Transaksi](#)

Nominal Rp799.200

Biaya Admin Rp2.500

Total Rp801.700

[Bagikan](#)

OK

REKENING TELEPON KANTOR
BAG. TATA PEMERINTAHAN
BULAN SEPTEMBER 2023

16.18

Transaksi Berhasil

Tanggal 20 Sep 2023 | 16:17:54
WIB

Nomor Referensi 586205895659

Sumber Dana VENY DIA KENCANA
0044 **** * 538

Jenis Transaksi Pembayaran Telkom

Nama KEPALA BAGIAN
PEMERINTAHAN

Nomor Pelanggan 0334887464

[Lihat Detail Transaksi](#)

Nominal Rp33.577

Biaya Admin Rp2.500

Total Rp36.077

[Bagikan](#)

OK

2. Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah





3. Fasilitas Pemeliharaan BMD

REKAPITULASI BELANJA BBM UNTUK KANTOR BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BULAN JULI S.D AGUSTUS 2023			
NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	8/7/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	200.000,00
2	10/7/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	400.000,00
3	12/7/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	300.000,00
4	19/07/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	200.000,00
5	24/07/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	200.000,00
6	3/8/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	450.000,00
7	11/8/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	430.000,00
8	14/08/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	400.000,00
9	19/08/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	430.000,00
10	24/08/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	323.750,00
11	26/08/2023	Pembelian BBM Mobil Dinas Bagian Tata Pemerintahan N 1081 YP	420.000,00
Jumlah			3.753.750,00

Lumajang, 28 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran Pembantu



ACI DHAMAR KARTIKA

NIP. 19840805 200604 2 004







4. Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan

- Sosialisasi Sinergisitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2023





➤ **Pelaporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Semester I Tahun 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

Kode	Indek
Buat dari: <i>Bagian Tata Pemerintahan Setda</i>	Diterima tanggal: <i>17/7/23</i>
Tanggal surat	Nomor Agenda
Nomor surat: <i>188/244/MS/4/2023</i>	Ditentukan kepada: <i>2%</i>
Perihal: <i>Laporan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Semester I Tahun 2023</i>	1. <i>Ka. Bag. Tata Pemerintahan</i>
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

INSTRUKSI / INFORMASI

- Terimakasih

- Buat lampiran ke Camat!

ISI DISPOSISI

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Alun – Alun Utara Nomor 7 Lumajang Tlp. 0334-887464
Fax. 8874641, U M A J A N G 67316

LAPORAN

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah
D a r i : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
Nomor : 138/247 /427.11/2023
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Semester I Tahun 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu dilakukan evaluasi pada pelaksanaan pelayanan di Kecamatan sekaligus memantau sampai sejauh mana pelaksanaan tugas sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat melalui pelaporan yang dilakukan Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diberikan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam bentuk laporan PATEN.

Hasil laporan PATEN tersebut merupakan dasar evaluasi kami dalam membuat laporan analisa per semester terkait pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat dan dasar evaluasi penyelenggaraan PATEN semester II menggunakan dasar Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
3. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

C. Tujuan

Memantau dan menganalisis perkembangan pelaksanaan PATEN terutama pada pelaksanaan tugas sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan :

- ✓ Secara umum pelaksanaan kewenangan pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat pada Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku, namun masih perlu terus dilakukan pembinaan serta penertiban pelaporan setiap bulannya.
- ✓ Masing – masing kewenangan sudah dilengkapi dengan pedoman teknis pelaksanaan dan pedoman format untuk membantu kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan eksternal dan internal kecamatan.

2. Saran :

- ✓ Pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada camat harus dipantau dan di evaluasi secara berkala melalui pelaporan PATEN setiap bulannya.
- ✓ Sosialisasi dan pembinaan terkait teknis pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 akan dilaksanakan secara terus menerus.

V. PENUTUP

Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan untuk dapatnya diberikan petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Lumajang, 17 Juli 2023

Mengetahui,
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

[Signature]
Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Kepala Bagian
Tata Pemerintahan

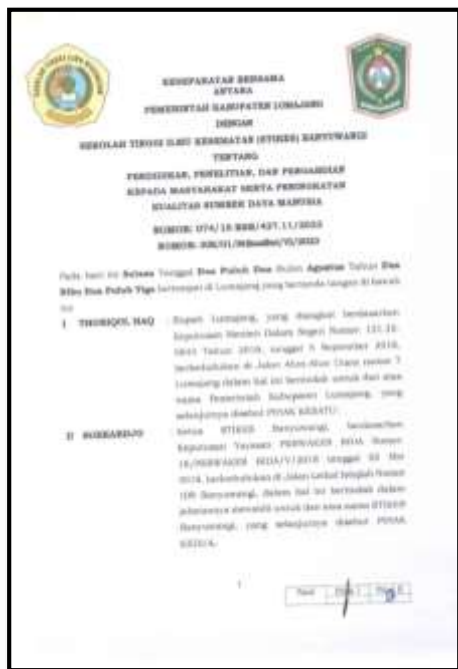
[Signature]
INDRIONO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001



5. Fasilitas dan Koordinasi Kerjasama yang dilaksanakan

➤ Dokumen Kerjasama

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Stikes Hafshawati Banyuwangi.



2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kejaksaan Negeri Lumajang





3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang



4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Rumah Sakit Wijaya Kusuma





5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT. Permata Nahdlatul Ulama



6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Rumah Sakit Islam





7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Rumah Sakit Bahayangkara Tingkat III Lumajang



8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang



9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang (Dinsos P3A) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Lumajang

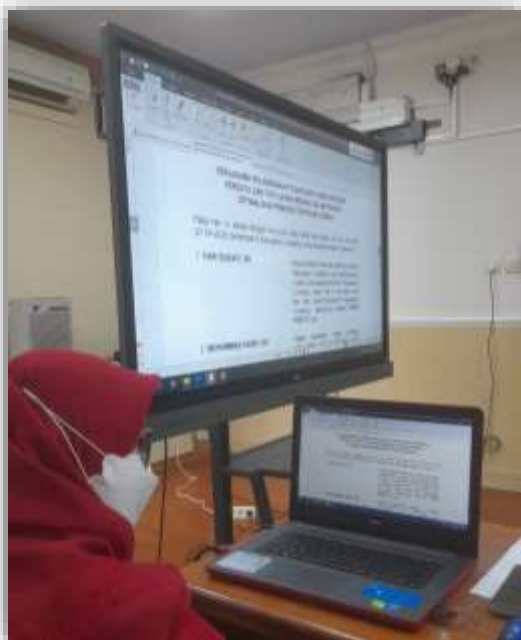


➤ Rapat Koordinasi Kerjasama

1. Fasilitasi Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Stikes Hafshawati Banyuwangi



2. Fasilitasi Rapat Koordinasi Pembahasan Draft dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kejaksaan Negeri Lumajang



3. **Fasilitasi Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lumajang**



4. **Fasilitasi Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Rumah Sakit Wijaya Kusuma, PT. Permata Nahdlatul Ulama, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Bahayangkara Tingkat III Lumajang dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang**





5. Fasilitasi Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Pemerintah Kabupaten Lumajang (Dinsos P3A) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Lumajang





6. Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Aton - Aton Utara No. 7 Lumajang Telp. (0334) 881422
LUMAJANG
BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang kami yang bertanda tangan dibawah ini bersama-sama telah melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah Trwulan I Tahun 2023 (Aset Lainnya) pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

A. Rekap: Aset Lain - lain

No	Uraian	Bertambah		Berkurang		Keterangan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	Kedaaan Awal Aset Lain-lain per 1 Januari 2023	28	74.410.240,00			Sedr Awal Th 2023
2	Penambahan Aset Lain-lain dari Aset Tetap					
3	Penambahan Aset Lain-lain berasal dari Mutasi antar SKPD					
4	Pengurangan Aset Lain-lain					
5	Lain-Lain					
	Jumlah (2 s/d 5)					
	Jumlah (1 s/d 5)					
	Kedaaan Akhir Aset Lain-lain	28	74.410.240,00			
	Per 31 Maret 2023	28	74.410.240,00			

B. Properti Investasi

No.	Uraian	Bertambah		Berkurang		Keterangan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	Kedaaan Awal Properti Investasi per 1 Januari 2023	-	-	-	-	Sedr Awal Th 2023
2	Penambahan Properti Investasi dari Aset Tetap					
3	Penambahan Properti Investasi berasal dari Mutasi antar SKPD					
4	Pengurangan Properti Investasi					
5	Lain-Lain					
	Jumlah (2 s/d 5)					
	Jumlah (1 s/d 5)					
	Kedaaan Akhir Properti Investasi					
	Per 31 Maret 2023 (Harga Perolehan)					

C. Rekap: ATB

No	Uraian	Bertambah		Berkurang		Keterangan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	Kedaaan Awal Aset Lain-lain per 1 Januari 2023	2	236.150.000,00			Sedr Awal Th 2023
2	Realisasi dan Bekanja Modal yang membentuk Aset Tak berwujud					
3	Penambahan Aset Tetap (AT) berasal dari Hibah					
4	Penambahan Aset Tetap (AT) berasal dari Mutasi antar SKPD					
5	Realisasi dan Bekanja Barang dan Jasa yang membentuk Aset Tak berwujud					
6	Pengurangan Aset Tak Berwujud					
7	Lain-Lain					
	Jumlah (2 s/d 10)					
	Jumlah (1 s/d 10)	2	236.150.000,00			
	Kedaaan Akhir Aset Tak Berwujud	2	236.150.000,00			
	Per 31 Maret 2023	2	236.150.000,00			

sebagaimana Rekapitulasi Jumlah Mutasi Aset Lain-lain terlampir

Demikian kegiatan rekonsiliasi dilaksanakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Lumajang, 10 Mei 2023
Yang Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah
Tahun Anggaran 2023,

Operator Pelaporan BMD
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

VENY DIA KENGANA

Pengurus Barang
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

MHDHAMD YANI
NIP. 19730521 200901 1 004

Mengetahui
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

INDRIKO KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001

Petugas Rekonsiliasi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ERWIN HARI PRASETYO

Ka. Sub Bidang Penelausahaan Barang
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

MASVUDI, S.Sos
NIP. 19730425 199602 1 001

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Dwi DAMAWAN IRIQNO, S.Sos
NIP. 19550901 198603 1 009



7. Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										DRAF Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Unit	Kategori	Sub	Kategori	Kategori				T-1	T				T+1	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp0								
Februari						Rp0								
Maret						Rp0								
April						Rp0								
Mai						Rp0								
Juni						Rp0								
Juli						Rp0								
Agustus						Rp0								
September						Rp0								
Oktober						Rp0								
November						Rp0								
Desember						Rp0								
Jumlah						Rp0								
<p>Lumajang, tanggal _____</p> <p>SEKRETARIS DAERAH</p> <p><u>Drs. AGUS TRIYONO, M.Si</u> NIP. 196905071989031004</p>														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan										
1.	Drs. AGUS TRIYONO, M.Si	196905071989031004	Ketua											
2.	Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si	196703251993122001	Wakil Ketua											

DPA-BELANJA - SEKRETARIAT DAERAH - Persepan APBD Kab. Lumajang Halaman 1 dari 11